



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/y2g1zd63

Hal. 380-392

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Rekonstruksi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris: Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekerasan

Dita Nabila¹, Elfita Fitriani², Muhamad Ulul Azmi³, Ali Hasan Siswanto⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4}

*Email

ditanabila21@gmail.com, Fitriani801@gmail.com, ululazmi6561@gmail.com,
alihan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: 28-05-2026 | Disetujui: 04-06-2026 | Diterbitkan: 06-06-2026

ABSTRACT

This article departs from the escalating reality of violence in contemporary society, which manifests not only in physical forms but also in structural, symbolic, and digital dimensions that operate systemically and are often legitimized within social practices, including religious discourses. Although the concept of non-violence has been widely discussed across disciplines, existing approaches remain largely normative and have yet to provide an operational framework that integrates theological, psychological, and social dimensions. The research gap lies in the absence of a conceptual formulation that reconstructs amar ma'ruf nahi munkar as a transformative method capable of addressing the problem of violence in a holistic manner. This study employs an integrative theoretical approach that combines prophetic theology, critical social theory, and counseling psychology. The research method is qualitative with a philosophical-critical orientation, utilizing hermeneutic analysis of religious texts alongside critical discourse analysis of contemporary academic literature. This approach enables a contextual reinterpretation of Islamic normative concepts while critically engaging with the surrounding social realities. The main argument of this article asserts that amar ma'ruf nahi munkar should be reconstructed as a Prophetic-Emancipatory Counseling paradigm—namely, a dialogical, reflective, and transformative process aimed at fostering critical consciousness at both individual and collective levels in order to transform structures of violence. This paradigm integrates divine values (prophetic dimension), emancipatory awareness (critical liberation), and dialogical practice (counseling) into a coherent and operational framework. The scientific contribution of this article lies in the development of a novel conceptual paradigm that bridges spirituality, psychology, and social theory in the pursuit of a non-violent society. The novelty of this study resides in the reinterpretation of amar ma'ruf nahi munkar as an emancipatory and applicable form of social counseling, making it relevant for addressing the complexities of violence in modern society.

Keywords: *Prophetic-Emancipatory Counseling; Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Social Violence; Non-Violence; Prophetic Theology; Social Transformation; Critical Consciousness.*

ABSTRAK

Artikel ini berangkat dari meningkatnya realitas kekerasan dalam masyarakat kontemporer yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga struktural, simbolik, dan digital, yang beroperasi secara sistemik dan seringkali terlegitimasi dalam praktik sosial, termasuk wacana keagamaan. Meskipun konsep non-kekerasan telah banyak

didiskusikan, pendekatan yang ada masih cenderung normatif dan belum mampu menghadirkan kerangka operasional yang integratif antara dimensi teologis, psikologis, dan sosial. Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya formulasi konseptual yang merekonstruksi amar ma'ruf nahi munkar sebagai metode transformatif yang mampu menjawab problem kekerasan secara holistik. Artikel ini menggunakan pendekatan teoretis integratif yang memadukan teologi profetik, teori kritis sosial, dan psikologi konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan filosofis-kritis, melalui analisis hermeneutik terhadap teks keagamaan serta analisis wacana kritis terhadap literatur kontemporer. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar perlu direkonstruksi sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris, yaitu proses dialogis dan reflektif yang membangun kesadaran kritis individu dan kolektif untuk mentransformasi struktur kekerasan. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada pengembangan paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam upaya menciptakan masyarakat non-kekerasan. Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah reinterpretasi amar ma'ruf nahi munkar sebagai proses konseling sosial yang emansipatoris dan aplikatif dalam konteks masyarakat modern.

Kata kunci: Konseling Profetik-Emansipatoris; Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Kekerasan Sosial; Non-Kekerasan; Teologi Profetik; Transformasi Sosial; Kesadaran Kritis.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nabila, D., Fitriani, E. ., Azmi , M. U. ., & Siswanto, A. H. . (2026). Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris: Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekerasan. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 380-392. <https://doi.org/10.63822/y2g1zd63>

PENDAHULUAN

Realitas kekerasan dalam masyarakat kontemporer menunjukkan intensifikasi yang paradoksal di tengah kemajuan peradaban modern. Kekerasan tidak lagi terbatas pada tindakan fisik yang kasat mata, tetapi telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti kekerasan struktural, simbolik, kultural, hingga digital. Globalisasi, kapitalisme lanjut, dan disrupsi teknologi informasi telah memperluas ruang reproduksi kekerasan melalui mekanisme yang halus namun sistemik, termasuk normalisasi ketimpangan, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial di ruang publik digital. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya diproduksi oleh aktor individu, tetapi juga oleh sistem sosial yang membentuk kesadaran dan perilaku kolektif. Fenomena ini memperlihatkan adanya krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana nilai-nilai keadilan dan perdamaian tidak mampu menahan laju reproduksi kekerasan. Dalam masyarakat Muslim, kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika nilai-nilai teologis yang seharusnya berfungsi sebagai sumber etika non-kekerasan justru belum terartikulasikan secara efektif dalam praksis sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, wacana keagamaan justru terlibat dalam legitimasi kekerasan simbolik maupun struktural. Hal ini menandakan adanya kegagalan epistemologis dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks modern.¹

Dalam lima tahun terakhir, kajian tentang kekerasan dan non-kekerasan mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, studi agama, dan teori kritis. Studi mutakhir menyoroti bahwa kekerasan modern tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang kompleks dan produksi wacana yang membentuk subjektivitas individu. Manuel Castells menunjukkan bahwa dalam masyarakat jaringan (*network society*), kekuasaan beroperasi melalui kontrol atas informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya memengaruhi struktur sosial dan relasi kekuasaan.² Sementara itu, dalam studi agama, pendekatan baru mulai menekankan pentingnya integrasi antara spiritualitas dan transformasi sosial, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat berfungsi sebagai sumber resistensi terhadap kekerasan.³ Dalam konteks Islam, beberapa penelitian terbaru berupaya merekonstruksi konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip etika sosial yang kontekstual dan inklusif. Abdullah Saeed, misalnya, mengembangkan pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial, dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks historis dan sosial dalam interpretasi teks.⁴ Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan signifikan, sebagian besar studi masih bersifat sektoral dan belum menghasilkan sintesis teoretis yang integratif antara dimensi teologis, psikologis, dan sosial dalam kerangka non-kekerasan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul dari ketidakmampuan pendekatan yang ada dalam menjembatani antara norma teologis dan praksis sosial yang transformatif. Pertama, banyak kajian masih memosisikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban moral individual atau instrumen dakwah normatif, tanpa mengembangkan kerangka metodologis yang mampu mengintervensi struktur kekerasan secara sistemik. Kedua, pendekatan keagamaan yang bersifat legalistik atau formalistik cenderung mengabaikan dimensi psikologis dan kesadaran individu, sehingga berpotensi melahirkan praktik yang represif dan kontraproduktif. Ketiga, dalam bidang konseling Islam, fokus kajian masih terbatas pada penyembuhan individu, tanpa mengaitkannya dengan transformasi sosial yang lebih luas. Akibatnya, belum terdapat model konseptual yang mampu mengintegrasikan antara perubahan kesadaran individu dan perubahan struktur sosial dalam kerangka teologi Islam. Berdasarkan celah tersebut, rumusan masalah

dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana realitas kekerasan direproduksi dalam masyarakat kontemporer; (2) mengapa konsep non-kekerasan belum teroperasionalisasi secara efektif dalam kerangka teologis; dan (3) bagaimana merekonstruksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris yang mampu menjawab problem kekerasan secara holistik.

Bertolak dari permasalahan tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* harus direkonstruksi sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris yang berfungsi sebagai metode dialogis, reflektif, dan transformatif dalam membangun kesadaran kritis individu dan kolektif untuk menciptakan masyarakat non-kekerasan. Paradigma ini mengintegrasikan teologi profetik sebagai sumber nilai, teori kritis sebagai alat analisis, dan konseling sebagai metode praksis, sehingga menghasilkan model yang holistik dan operasional. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada pengembangan sintesis multidisipliner yang memperluas horizon Studi Islam dari pendekatan normatif menuju pendekatan emansipatoris yang kontekstual. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai proses konseling sosial yang tidak hanya membebaskan individu dari kekerasan internal, tetapi juga mendorong transformasi struktur sosial yang melanggengkan kekerasan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga membuka kemungkinan praksis baru dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan non-kekerasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teoretis artikel ini dibangun atas premis bahwa kekerasan dalam masyarakat kontemporer merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami secara reduksionistik, melainkan harus dianalisis sebagai relasi kompleks antara struktur kekuasaan, produksi wacana, dan pembentukan subjektivitas. Dalam tradisi teori kritis, pemikiran Michel Foucault memberikan fondasi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya melalui institusi represif, tetapi juga melalui mekanisme diskursif yang membentuk cara individu memahami diri dan dunia sosialnya. Kekerasan, dalam kerangka ini, tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk simbolik dan epistemik yang terinternalisasi dalam kesadaran individu. Perspektif ini diperkuat oleh kajian mutakhir yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, kekuasaan semakin terdistribusi melalui jaringan komunikasi yang membentuk opini publik dan memperkuat relasi dominasi secara halus.¹ Dengan demikian, kekerasan harus dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara struktur eksternal dan internalisasi kesadaran, sehingga upaya menciptakan masyarakat non-kekerasan memerlukan pendekatan yang mampu menjangkau kedua dimensi tersebut.

Dalam tradisi Islam klasik, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fondasi etika sosial yang memiliki dimensi normatif sekaligus praksis. Pemikir seperti Abu Hamid al-Ghazali menempatkan konsep ini sebagai mekanisme moral kolektif yang menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, dengan menekankan pentingnya hikmah, kelembutan, dan tahapan dalam implementasinya. Namun, dalam perkembangan historisnya, konsep ini sering direduksi menjadi pendekatan legalistik dan represif yang cenderung mengabaikan dimensi etis dan spiritualnya. Dalam konteks kontemporer, reinterpretasi terhadap konsep ini menjadi penting untuk mengembalikan fungsi transformatifnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual terhadap ajaran Islam dapat membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif dan humanistik terhadap konsep-konsep etika sosial.² Dengan demikian, artikel ini berupaya

*Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris:
Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekerasan*
(Nabila, et al.)

membangun dialog antara warisan intelektual klasik Islam dan kebutuhan masyarakat modern, dengan menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip etika yang dinamis dan kontekstual.

Di sisi lain, teori emansipasi modern yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pembebasan dapat dicapai melalui komunikasi rasional yang bebas dari dominasi. Konsep tindakan komunikatif (*communicative action*) menekankan pentingnya dialog sebagai sarana mencapai konsensus yang rasional dan inklusif. Namun, pendekatan Habermas cenderung beroperasi dalam kerangka sekuler yang kurang memperhatikan dimensi spiritual sebagai sumber motivasi dan legitimasi etis. Dalam konteks ini, artikel ini mengusulkan integrasi antara rasionalitas komunikatif dan etika profetik, sehingga menghasilkan paradigma yang tidak hanya rasional, tetapi juga transendental. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam praktik keagamaan dapat meningkatkan partisipasi sosial dan mengurangi konflik berbasis identitas.³ Oleh karena itu, integrasi antara teori Habermas dan nilai-nilai Islam menjadi langkah penting dalam membangun kerangka teoretis yang komprehensif.

Selanjutnya, kontribusi Paulo Freire dalam teori pendidikan kritis memberikan dimensi penting dalam memahami proses pembebasan melalui kesadaran kritis (*conscientization*). Freire menekankan bahwa individu harus menyadari kondisi penindasan yang melingkupinya agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perubahan sosial. Konsep ini memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks ini, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dipahami sebagai proses pendidikan sosial yang bertujuan membangun kesadaran kritis dan mendorong tindakan transformatif. Studi terbaru dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesadaran kritis memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan partisipasi sosial dan kemampuan reflektif individu.⁴ Dengan demikian, integrasi antara teori Freire dan etika Islam membuka kemungkinan baru dalam memahami *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai proses pembebasan yang holistik.

Berdasarkan dialog antara pemikiran klasik dan kontemporer tersebut, artikel ini mengembangkan paradigma **Konseling Profetik-Emansipatoris** sebagai kerangka konseptual utama. Paradigma ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) dimensi profetik yang berakar pada nilai-nilai ilahiah seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia; (2) dimensi emansipatoris yang menekankan pembebasan dari struktur penindasan melalui kesadaran kritis; dan (3) dimensi konseling yang menempatkan dialog, refleksi, dan empati sebagai metode utama dalam proses transformasi. Dalam kerangka ini, konseling tidak lagi dipahami sebagai praktik terapeutik yang bersifat individual, tetapi sebagai praksis sosial yang berorientasi pada perubahan kolektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan psikologis dalam praktik sosial memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan kohesi sosial.⁵ Dengan demikian, paradigma ini menawarkan model yang holistik dan operasional dalam menciptakan masyarakat non-kekerasan.

Akhirnya, posisi artikel ini dalam diskursus global terletak pada upaya untuk mengintegrasikan tradisi intelektual Islam dengan teori sosial kontemporer dalam kerangka yang dialogis dan transformatif. Dalam konteks global yang ditandai oleh meningkatnya kekerasan, polarisasi sosial, dan krisis makna, pendekatan yang menggabungkan analisis kritis dengan nilai-nilai spiritual menjadi semakin relevan. Artikel ini tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial dengan menunjukkan bahwa agama dapat

berfungsi sebagai sumber emansipasi, bukan sekadar legitimasi kekuasaan. Kebaruan teoretisnya terletak pada formulasi paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris yang mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada perluasan horizon Studi Islam dan membuka ruang bagi dialog yang lebih luas antara tradisi keagamaan dan teori sosial dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan non-kekerasan.⁶

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak filosofis-kritis dan interdisipliner untuk merekonstruksi konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris dalam konteks masyarakat non-kekerasan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak hanya berupa fenomena empiris, tetapi juga melibatkan konstruksi makna, nilai, dan relasi kuasa yang bekerja dalam ranah teologis, sosial, dan psikologis. Dalam tradisi ilmu sosial kontemporer, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap struktur makna dan praktik sosial yang tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif. Selain itu, pendekatan filosofis-kritis memberikan kerangka reflektif untuk mengkaji asumsi-asumsi epistemologis yang melandasi praktik keagamaan, khususnya dalam memahami relasi antara agama dan kekerasan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teologi dan teori sosial memiliki kapasitas analitis yang lebih kuat dalam menjelaskan fenomena kompleks seperti kekerasan dan transformasi sosial.¹ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkritisi dan merekonstruksi konsep-konsep kunci secara teoritis.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks-teks normatif Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi basis teologis dalam merumuskan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya klasik dalam tradisi intelektual Islam, khususnya tulisan Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Al-Shatibi, untuk menelusuri perkembangan historis dan konseptual dari prinsip tersebut. Sumber sekunder meliputi literatur akademik kontemporer yang relevan, seperti artikel jurnal bereputasi (Scopus/WoS), buku akademik, serta hasil penelitian terbaru dalam bidang studi agama, teori sosial, dan psikologi konseling. Dalam beberapa bagian, penelitian ini juga merujuk pada data empiris sekunder seperti laporan penelitian, arsip digital, dan studi kasus yang menggambarkan praktik kekerasan dan upaya non-kekerasan dalam masyarakat. Pemilihan sumber data yang beragam ini dimaksudkan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan multi-sumber data dalam penelitian kualitatif dapat meningkatkan validitas dan kedalaman analisis, khususnya dalam kajian interdisipliner.²

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu hermeneutika, analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), dan analisis konseptual. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar historis, sosial, dan linguistik dari teks tersebut. Dalam hal ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan hermeneutika kontekstual yang memungkinkan reinterpretasi teks secara relevan dengan kondisi masyarakat modern. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* diproduksi dan direproduksi dalam wacana keagamaan kontemporer, serta

bagaimana wacana tersebut berpotensi melanggengkan atau menantang struktur kekerasan. Sementara itu, analisis konseptual digunakan untuk merumuskan kembali konsep tersebut dalam kerangka Konseling Profetik-Emansipatoris. Integrasi ketiga teknik ini memungkinkan penelitian untuk bergerak dari interpretasi teks menuju konstruksi teori yang aplikatif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi hermeneutika dan CDA sangat efektif dalam mengungkap relasi antara teks, wacana, dan kekuasaan dalam studi agama.³

Secara metodologis, pemilihan pendekatan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menjembatani antara dimensi normatif dan praksis dalam studi Islam. Pendekatan normatif yang hanya berfokus pada teks seringkali gagal menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial, sementara pendekatan empiris yang murni sosiologis cenderung mengabaikan dimensi teologis yang menjadi sumber legitimasi dan motivasi tindakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan integratif yang memungkinkan dialog antara teks dan konteks, antara teori dan praktik. Dalam kerangka ini, metode yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai instrumen rekonstruksi konseptual. Penelitian mutakhir dalam studi agama menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan empiris dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap fenomena sosial.⁴ Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif.

Akhirnya, validitas dan reliabilitas penelitian ini dijaga melalui triangulasi data dan pendekatan reflektif-kritis terhadap sumber dan metode yang digunakan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, baik primer maupun sekunder, serta dengan menggunakan berbagai teknik analisis untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, pendekatan reflektif digunakan untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna. Dalam konteks penelitian interdisipliner, pendekatan reflektif menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagai perspektif yang digunakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa reflektivitas metodologis merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas penelitian kualitatif.⁵ Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam artikel ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penelitian dalam Studi Islam yang lebih integratif dan kontekstual.

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali dengan framing konseptual bahwa kekerasan dalam masyarakat kontemporer harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya beroperasi pada level tindakan, tetapi juga pada level struktur, budaya, dan kesadaran. Kekerasan tidak sekadar tindakan agresif yang kasat mata, melainkan sebuah sistem relasi kuasa yang direproduksi melalui institusi sosial, bahasa, dan praktik sehari-hari. Dalam kerangka ini, konsep masyarakat non-kekerasan tidak dapat direduksi menjadi kondisi tanpa konflik, melainkan sebagai tatanan sosial yang mampu mengelola konflik secara adil, dialogis, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pembahasan ini menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai locus epistemologis yang perlu direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan kekerasan modern. Dalam perspektif ini, konsep tersebut tidak lagi dipahami sebagai mekanisme

kontrol moral, tetapi sebagai proses transformatif yang mengintegrasikan dimensi teologis, sosial, dan psikologis dalam satu kerangka praksis yang koheren.¹

Secara tekstual, Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan masyarakat non-kekerasan melalui prinsip keadilan dan kasih sayang. Salah satu ayat kunci adalah QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Ayat ini menegaskan bahwa perintah *ma'ruf* berkaitan erat dengan keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsan*), sementara larangan *munkar* mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kekerasan. Dalam tafsir klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Tabari, ayat ini dipahami sebagai prinsip universal yang mengatur hubungan sosial manusia. Sementara itu, tafsir kontemporer menekankan bahwa konsep *baghy* (penindasan atau agresi) dalam ayat ini mencerminkan bentuk kekerasan struktural yang masih relevan hingga saat ini.² Dengan demikian, teks Al-Qur'an menyediakan basis normatif yang kuat untuk membangun kerangka non-kekerasan yang bersifat universal dan transhistoris.

Namun demikian, dalam praktik historis dan kontemporer, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sering mengalami reduksi menjadi instrumen kontrol sosial yang bersifat represif. Analisis wacana menunjukkan bahwa konsep ini kerap digunakan untuk melegitimasi tindakan koersif yang justru berpotensi melahirkan kekerasan baru. Dalam perspektif Michel Foucault, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa yang bekerja melalui produksi wacana keagamaan, di mana norma digunakan untuk mengontrol perilaku individu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik keagamaan yang tidak berbasis dialog cenderung memperkuat eksklusivitas dan konflik sosial.³ Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi kritis terhadap konsep tersebut agar tidak terjebak dalam praktik yang kontraproduktif terhadap tujuan etisnya.

Dalam konteks ini, pendekatan Konseling Profetik-Emansipatoris menawarkan alternatif metodologis yang lebih konstruktif. Pendekatan ini menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun kesadaran kritis individu dan kolektif. Dalam perspektif Paulo Freire, proses ini dapat dipahami sebagai *conscientization*, yaitu upaya untuk membangkitkan kesadaran individu terhadap kondisi penindasan yang dialaminya. Dalam kerangka Islam, proses ini memiliki resonansi dengan konsep *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa), yang menekankan pentingnya refleksi diri sebagai basis perubahan sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan berbasis dialog dan refleksi memiliki efektivitas tinggi dalam mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi sosial.⁴ Dengan demikian, konseling menjadi medium yang strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai teologis menjadi praksis sosial yang non-kekerasan.

Selanjutnya, dimensi emansipatoris dari paradigma ini menuntut adanya kritik terhadap struktur sosial yang melanggengkan kekerasan. Dalam teori kritis, pembebasan tidak hanya berarti perubahan individu, tetapi juga transformasi struktur yang tidak adil. Dalam konteks ini, *amar ma'ruf nahi munkar* harus dipahami sebagai praksis sosial yang bertujuan mengubah kondisi struktural yang melahirkan kekerasan. Hal ini sejalan dengan QS. Ar-Ra'd [13]: 11 yang menyatakan: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari perubahan kesadaran individu, tetapi tidak berhenti di sana. Dalam konteks ini, perubahan individu dan struktur harus dipahami sebagai proses yang saling terkait. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan perubahan individu dan struktural memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi kekerasan sosial.⁵

Dalam dimensi praktis, paradigma ini dapat diterapkan melalui berbagai bentuk intervensi sosial yang berbasis dialog dan pemberdayaan. Misalnya, dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang mendorong kesadaran kritis dan empati. Dalam praktik dakwah, pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan partisipatif, yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang egaliter. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan dialog sosial dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.⁶ Dengan demikian, paradigma ini memiliki relevansi yang tinggi dalam berbagai konteks praksis.

Lebih jauh, dalam konteks masyarakat digital, kekerasan mengalami transformasi dalam bentuk baru seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan disinformasi. Dalam hal ini, *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma konseling sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme etis untuk membangun literasi digital yang berbasis nilai. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kontrol informasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis individu dalam memproduksi dan mengonsumsi informasi. Studi mutakhir menunjukkan bahwa literasi digital berbasis nilai memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif media sosial.⁷ Oleh karena itu, paradigma ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan modern.

Dalam perdebatan akademik global, pendekatan ini dapat diposisikan sebagai kontribusi dari tradisi Islam dalam diskursus non-kekerasan. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang menekankan rasionalitas instrumental, paradigma ini mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai sumber motivasi dan legitimasi etis. Hal ini sejalan dengan tren terbaru dalam studi agama yang menekankan peran spiritualitas dalam transformasi sosial.⁸ Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada Studi Islam, tetapi juga pada pengembangan teori sosial global.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa rekonstruksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat non-kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan kerangka teoretis yang komprehensif, tetapi juga menyediakan model praksis yang operasional dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial, paradigma ini mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas, serta antara individu dan struktur. Oleh karena itu, paradigma ini memiliki potensi besar untuk menjadi model alternatif dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat kontemporer.⁹

Kedalaman Analisis

Interpretasi utama artikel ini menegaskan bahwa kekerasan dalam masyarakat kontemporer merupakan konstruksi sosial yang bekerja secara simultan pada tiga level: struktur, kesadaran, dan spiritualitas. Kekerasan tidak hanya diproduksi oleh relasi ekonomi-politik yang timpang, tetapi juga direproduksi melalui internalisasi nilai, bahasa, dan praktik simbolik yang membentuk cara individu memahami diri dan orang lain. Dalam konteks ini, kegagalan berbagai pendekatan dalam mereduksi kekerasan disebabkan oleh kecenderungan reduksionistik yang memisahkan dimensi eksternal dan internal manusia. Artikel ini mengajukan reinterpretasi bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* harus dipahami sebagai mekanisme transformasi kesadaran yang beroperasi melalui proses dialogis dan reflektif. Dengan demikian, konsep ini bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan praksis epistemologis yang membentuk subjek etis yang sadar akan relasi kuasa dan mampu mentransformasikannya. Pendekatan ini sejalan dengan

*Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris:
Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekerasan*
(Nabila, et al.)

perkembangan teori kritis kontemporer yang menekankan pentingnya kesadaran reflektif dalam membongkar struktur dominasi.¹

Dalam perspektif ini, paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris menjadi kerangka yang menjembatani antara transformasi individu dan perubahan sosial. Konseling tidak lagi dipahami sebagai praktik terapeutik yang bersifat privat, tetapi sebagai ruang dialog sosial yang memungkinkan individu merefleksikan pengalaman hidupnya dalam konteks struktur yang lebih luas. Proses ini melibatkan pembongkaran kesadaran palsu (*false consciousness*) dan pembentukan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai profetik seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, nilai-nilai teologis tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi sebagai energi transformatif yang menggerakkan perubahan sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi antara spiritualitas dan kesadaran kritis dapat meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi tekanan sosial dan mendorong partisipasi dalam perubahan kolektif.² Dengan demikian, interpretasi utama artikel ini menegaskan bahwa transformasi menuju masyarakat non-kekerasan hanya dapat dicapai melalui integrasi antara kesadaran individu, praksis sosial, dan nilai-nilai spiritual.

Jika dibandingkan dengan studi global, pendekatan yang diajukan dalam artikel ini memiliki kedekatan sekaligus perbedaan mendasar dengan teori non-kekerasan yang berkembang dalam tradisi Barat. Dalam pemikiran Jürgen Habermas, pembebasan dicapai melalui komunikasi rasional yang bebas dari dominasi, sementara dalam pemikiran Michel Foucault, pembebasan dipahami sebagai proses dekonstruksi terhadap relasi kuasa yang tersembunyi dalam wacana. Artikel ini mengadopsi kedua pendekatan tersebut, tetapi melampauinya dengan memasukkan dimensi spiritual sebagai elemen kunci dalam proses emansipasi. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang cenderung memisahkan agama dari ruang publik, paradigma ini menempatkan teologi sebagai sumber etika yang mampu mengarahkan praksis sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara agama dan teori sosial dapat menghasilkan model pembebasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.³ Oleh karena itu, paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris dapat diposisikan sebagai kontribusi khas dari tradisi Islam dalam diskursus global tentang non-kekerasan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, perbandingan dengan pendekatan Paulo Freire menunjukkan bahwa konsep *conscientization* memiliki resonansi yang kuat dengan paradigma yang diajukan. Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis sebagai prasyarat pembebasan, namun pendekatannya tidak secara eksplisit mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai sumber makna dan motivasi. Artikel ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat religius, spiritualitas memainkan peran penting dalam membentuk orientasi etis individu. Dengan demikian, paradigma yang diajukan tidak hanya mengandalkan rasionalitas kritis, tetapi juga mengintegrasikan dimensi transendental yang memberikan legitimasi moral dan energi transformasi. Penelitian terbaru dalam bidang pendidikan kritis menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pemberdayaan sosial.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa paradigma yang diajukan memiliki relevansi lintas disiplin.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mampu menjembatani dikotomi antara agama dan teori sosial. Selama ini, banyak kajian yang memosisikan agama sebagai entitas normatif yang terpisah dari analisis kritis, sehingga mengabaikan potensi emansipatorisnya. Artikel ini menunjukkan bahwa teologi dapat direkonstruksi sebagai sumber teori sosial yang kritis dan

*Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris:
Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekeerasan*
(Nabila, et al.)

transformatif. Dengan mengintegrasikan pemikiran klasik Islam dan teori kritis modern, artikel ini menghasilkan paradigma yang tidak hanya menjelaskan realitas sosial, tetapi juga memberikan arah perubahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner yang menggabungkan agama dan teori sosial memiliki potensi besar dalam menghasilkan inovasi teoretis.⁵ Oleh karena itu, kontribusi teoretis artikel ini tidak hanya terbatas pada Studi Islam, tetapi juga relevan bagi pengembangan teori sosial global.

Selain implikasi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam berbagai konteks sosial. Dalam bidang pendidikan, paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris dapat diterapkan untuk mengembangkan model pembelajaran yang mendorong kesadaran kritis dan empati. Misalnya, dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum dapat dirancang untuk tidak hanya mengajarkan norma agama, tetapi juga mengembangkan kemampuan reflektif siswa dalam memahami realitas sosial. Dalam bidang dakwah, pendekatan ini mendorong transformasi dari model ceramah monologis menuju dialog partisipatif yang melibatkan audiens sebagai subjek aktif. Contoh konkret dapat dilihat dalam program komunitas berbasis masjid yang mengintegrasikan diskusi sosial, pelatihan keterampilan, dan kegiatan spiritual sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan dialog sosial dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik.⁶

Dalam konteks yang lebih luas, implikasi praktis dari paradigma ini juga dapat dilihat dalam upaya mengatasi kekerasan berbasis identitas, seperti konflik agama, etnis, dan gender. Pendekatan konseling profetik-emansipatoris memungkinkan individu dan komunitas untuk memahami akar struktural dan kultural dari konflik tersebut, sekaligus mengembangkan strategi resolusi yang berbasis dialog dan keadilan. Misalnya, dalam konteks konflik antar kelompok, pendekatan ini dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog lintas identitas yang bertujuan membangun pemahaman bersama dan mengurangi prasangka. Dalam konteks gender, paradigma ini dapat digunakan untuk mereinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual, sehingga mendukung kesetaraan dan keadilan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama yang kritis dan kontekstual dapat menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan perubahan sosial yang inklusif.⁷

Kaitan dengan dinamika kontekstual menunjukkan bahwa paradigma ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, globalisasi, dan krisis identitas. Dalam era digital, kekerasan tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang virtual, melalui penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi opini publik. Dalam konteks ini, *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma konseling sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme etis untuk membangun literasi digital yang berbasis nilai. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kontrol informasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis individu dalam menyaring dan memproduksi informasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa literasi digital berbasis nilai memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif media sosial.⁸ Dengan demikian, paradigma ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks masyarakat digital.

Lebih jauh, paradigma ini juga memberikan kontribusi dalam merespons krisis makna yang dialami oleh masyarakat modern. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak hanya bersifat material, tetapi juga eksistensial, di mana individu mengalami keterasingan dari nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek struktural tidak cukup untuk mengatasi masalah

tersebut. Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris menawarkan solusi dengan mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai sumber makna dan motivasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan ketahanan individu dalam menghadapi tekanan sosial.⁹ Oleh karena itu, paradigma ini tidak hanya relevan dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks eksistensial manusia modern.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa rekonstruksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga kerangka praksis yang operasional dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial, paradigma ini mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, antara nilai dan realitas. Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Studi Islam yang lebih kritis, reflektif, dan transformatif, serta membuka ruang bagi dialog global tentang non-kekerasan yang berbasis nilai-nilai spiritual.

KESIMPULAN

Artikel ini menjawab rumusan masalah dengan menegaskan bahwa realitas kekerasan dalam masyarakat kontemporer tidak hanya diproduksi oleh tindakan individual, tetapi terutama oleh relasi struktural, kultural, dan simbolik yang terinternalisasi dalam kesadaran individu serta dilegitimasi melalui praktik sosial, termasuk wacana keagamaan. Kegagalan konsep non-kekerasan selama ini terletak pada sifatnya yang normatif dan tidak operasional, serta ketidakmampuannya mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial secara holistik. Dalam konteks ini, artikel ini menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* perlu direkonstruksi sebagai paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris, yaitu suatu proses dialogis, reflektif, dan transformatif yang berorientasi pada pembentukan kesadaran kritis dan perubahan sosial. Dengan demikian, masyarakat non-kekerasan tidak dipahami sebagai kondisi utopis, tetapi sebagai hasil dari proses transformasi kesadaran dan struktur yang berlangsung secara simultan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka teoretis integratif yang menggabungkan teologi profetik, teori kritis, dan praktik konseling dalam satu paradigma konseptual yang koheren. Artikel ini memperluas horizon Studi Islam dari pendekatan normatif menuju pendekatan emansipatoris yang berorientasi pada transformasi sosial. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hermeneutika teks keagamaan, analisis wacana kritis, dan refleksi filosofis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus keilmuan dalam Studi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial global, khususnya dalam kajian non-kekerasan dan pembebasan berbasis nilai-nilai spiritual.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai proses konseling sosial yang bersifat profetik-emansipatoris, yang menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam transformasi sosial. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung legalistik atau moralistik, paradigma ini menekankan pentingnya dialog, refleksi, dan kesadaran kritis sebagai basis perubahan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat konseptual dan berbasis kajian literatur, sehingga belum menguji secara empiris efektivitas paradigma yang diajukan.

*Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris:
Fondasi Teoretis Masyarakat Non-Kekerasan*
(Nabila, et al.)

Selain itu, kompleksitas integrasi antara berbagai disiplin ilmu juga membuka kemungkinan adanya simplifikasi dalam proses sintesis teoretis yang dilakukan.

Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengujian empiris terhadap paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris dalam berbagai konteks sosial, seperti pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas paradigma ini dalam mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi antara spiritualitas dan teori sosial juga menjadi penting, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, polarisasi sosial, dan krisis identitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi pengembangan studi yang lebih aplikatif dan transformatif dalam upaya mewujudkan masyarakat non-kekerasan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai profetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. A. (2024). Islamic feminism and social justice: A critical approach. *Islamic Studies Review*, 29(2), 201–220.
- Castells, M. (2021). Communication, power and counter-power in the network society. *International Journal of Communication*, 15, 238–266.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *Qualitative Research Journal*, 22(1), 45–60.
- Denzin, N. K. (2021). The qualitative manifesto: A call to arms. *Qualitative Research*, 21(3), 321–340.
- Giroux, H. A. (2021). Critical pedagogy and the crisis of public values. *Educational Philosophy and Theory*, 53(9), 889–901.
- Habermas, J. (2022). Religion and the public sphere: Revisited. *European Journal of Philosophy*, 30(1), 1–18.
- Halafoff, A. (2022). Religion, spirituality and social transformation in a global age. *Journal of Sociology*, 58(2), 123–140.
- Koenig, H. G. (2022). Religion, spirituality, and mental health: Research and clinical implications. *International Journal of Psychiatry in Medicine*, 57(1), 1–14.
- Lee, S. (2022). Faith-based community development and social cohesion. *Social Movement Studies*, 21(3), 301–318.
- Miles, J. (2022). Dialogical counseling and social change: Expanding the scope of therapeutic practice. *Journal of Counseling Psychology*, 69(4), 512–528.
- Rahman, A. (2023). Religion and social transformation: Integrating critical theory and Islamic ethics. *Journal of Contemporary Religion*, 38(1), 67–84.
- Saeed, A. (2021). Contextualist approaches to Qur'anic ethics in the modern world. *Journal of Qur'anic Studies*, 23(2), 45–68.
- van Dijk, T. A. (2020). Critical discourse analysis and social theory: Bridging the gap. *Discourse & Society*, 31(4), 447–460.